

**PENDEKATAN VALUE FOR MONEY DALAMPENGUKURAN KINERJA
KOTA PANGKALPINANG****Bappeda Kota Pangkalpinang**bappelitbangda@pangkalpinangkota.go.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian untuk menganalisis pengukuran kinerja di Kota Pangkalpinang. Adapun Kota Pangkalpinang merupakan kota perdagangan dan merupakan pusat kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan menggunakan pendekatan *value for money* dengan menghitung rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Data yang digunakan data sekunder dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah periode 2015 sampai dengan tahun 2019. Hasil menggambarkan bahwa dari segi ekonomis Pemerintah Kota Pangkalpinang memenuhi target. Namun dari rasio efisiensi dan efektifitas mengalami fluktuasi sehingga secara umum dalam periode lima tahun masih ada yang belum memenuhi target efisiensi dan efektivitas. Artinya Pemerintah Kota Pangkalpinang harus lebih optimal dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran yang telah direncanakan.

Kata Kunci: Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas**PENDAHULUAN**

Organisasi sektor publik salah satunya adalah pemerintahan yang tugas pokoknya adalah untuk menjamin daripada kesejahteraan masyarakat (Bastian, 2019). Konsep dari kesejahteraan masyarakat sangat multikompleks bukan berupa kesejahteraan fisik seperti material saja, akan tetapi termasuk kesejahteraan non fisik (PPN/Bappenas, 2019).

Saat ini, masyarakat sering kali menilai kinerja pemerintah sebagai organisasi sektor publik masih kurang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan, khususnya pemerintahan daerah. Pemerintah daerah terkesan bahwa sering mengeluarkan biaya untuk kegiatan yang kurang penting sehingga dianggap pemborosan (Antari & Sedana, 2018). Setiap aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk melaporkan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara transparan. Menurut Pramono (2014) pengukuran kinerja sektor publik sangat diperlukan untuk menilai daripada kinerja organisasi dalam bentuk pengukuran ekonomis, efisiensi dan efektif.

Dalam rangka memperoleh hasil pengukuran yang objektif dan menyeluruh meliputi perspektif yang bersifat *tangible* maupun *intangibile*, perlu pengukuran kinerja yang di desain agar dapat *representative* selain juga *applicable*. Menurut Hasthoro & Sunardi (2016) ada

beberapa alat pengukuran seperti metode *balance score card* dan metode *value for money*. *Balance score card* terdapat empat perspektif yang dinilai yaitu perspektif keuangan (financial), perspektif konsumen (*customer*), perspektif proses bisnis/intern (internal), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Karimi Muiruri, 2015), sedangkan metode *value for money* terdapat tiga elemen utama yakni ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Khikmah, 2014a).

Value for Money (VFM) Mardiasmo (2009) dan Siemiatycki & Farooqi (2012) suatu konsep dalam pengelolaan yang didasari pada tiga komponen yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Adapun ukuran ekonomi adalah perolehan input dengan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Artinya ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran inefisiensi. Selanjutnya efisiensi terkait dengan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau pelaksanaan input yang terendah untuk mendapatkan output tertentu. Kemudian efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output. Konsep *value for money* juga mengukur apakah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik sudah memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor public sebab kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan, namun secara koheren harus mempertimbangkan input, output dan outcome secara bersama-sama.

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu daerah otonom yang letaknya di bagian timur Pulau Bangka. Berdasarkan opini Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyajian laporan keuangan. Namun masih terdapatnya masalah dalam pengelolaan keuangan seperti belum optimalnya sistem pengendalian intern dan masih belum patuhnya terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan Kota Pangkalpinang. Terkait dengan pendekatan *value for money* di daerah telah banyak dilakukan kajiannya seperti (Erawan et al., 2019), Hidayat & Riharjo (2015), Sari (2014) dan Septariani (2018), namun penelitian terkait dengan kinerja pemerintah tetap layak dilakukan karena untuk menganalisis seberapa ekonomi, efisien dan efektivitas dalam penggunaan anggaran yang diberikan. Hal ini yang membuat peneliti untuk melakukan penelitian pengukuran kinerja Kota Pangkalpinang yang merupakan kota seribu senyuman.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Nursam (2017) dan Moehariono (2018) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui

karena tidak ada tolak ukurnya (Samsonowa, 2012). Oleh sebab itu perlu adanya alat ukur untuk mencapai suatu keberhasilan dalam suatu entitas atau organisasi.

Menurut Melnyk et al., (2014), Adams et al., (2014) dan Inayati (2018) pengukuran kinerja merupakan suatu proses dari penilaian suatu kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk memberikan informasi atas; efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan merasa senang akan barang dan jasa yang ditawarkan), hasil kegiatan dibandingkan dengan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Bastian, 2019). Selanjutnya menurut BPKP (2000) bahwa pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, artinya dalam implementasinya pengukuran kinerja tersebut membantu manajer dalam memonitor strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu pertama, sebagai alat perencana; kedua, sebagai alat pengendalian; ketiga, sebagai alat kebijakan fiskal; keempat, sebagai alat politik; kelima, sebagai alat koordinasi dan komunikasi; keenam, sebagai alat penilaian kinerja; ketujuh, sebagai alat motivasi; dan kedelapan, sebagai alat menciptakan ruang publik (Mardiasmo, 2009 ; Halim & Kusufi, 2017). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu dokumen rencana kinerja dari aspek finansial, dimana anggaran itulah yang akan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan pembangunan daerahnya. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan dan transfer.

Value For Money adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja, tetapi menggunakan aspek non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik (Septariani, 2018). Konsep *value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi (Khikmah, 2014b). Konsep *value for money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik.

Kriteria dari pengukuran kinerja dengan *value for money* sebagai berikut: diukur dengan persentasi rasio tertentu, jika diperoleh nilai rasio $x > 100\%$ menunjukkan kondisi yang tidak diharapkan, $x = 100\%$ berarti berimbang, dan $x < 100\%$ berarti menunjukkan kondisi yang diharapkan (Hadi 2010; Mahsun dalam Puspitasari 2006). Artinya jika persentasi dibawah 100% maka perusahaan dikatakan efisien, efektif dan ekonomis (West & Blackman, 2015; Zhonghua & Ye, 2012).

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Menurut Moh. Nazir (2014) dan Herdiansyah (2010) merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya

untuk menyajikan gambaran lengkap tentang suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran dan Belanja dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, serta data realisasi penerimaan dan pengeluaran Kota Pangkalpinang Tahun 2015 sampai dengan 2019.

Kinerja keuangan merupakan salah satu gambaran dari keberhasilan yang dinilai berdasarkan ukuran angka dalam satuan nilai uang, yakni dengan membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya. Adapun pengukuran value for money yang akan di analisis sebagai berikut formulanya:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Harga Output}} \times 100\%$$

dimana:

Output : dana realisasi penerimaan yang digunakan

Input : dana anggaran yang dianggarkan.

Kriteria:

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti ekonomis
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti ekonomis seimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak ekonomis

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{input}}{\text{output}} \times 100\%$$

dimana:

Output : hasil yang dicapai

Input : dana realisasi yang digunakan

Kriteria :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti efisien
- Jika diperoleh sama dengan 100% berarti efisiensi seimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak efisien

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{output}} \times 100\%$$

dimana:

outcome : target atau tujuan yang hendak dicapai

output : hasil yang dicapai

Kriteria :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif

- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas seimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efektif

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Value for Money

Analisis dari pengukuran *Value for Money* dihitung dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Kota Pangkalpinang periode 2015 sampai dengan 2019. Selanjutnya analisis masing-masing pengukuran sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis

Rasio ini menjelaskan rasio penghematan sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Tingkat ekonomis sebuah anggaran bisa dilihat dari berapa presentase tingkat pencapaian. Analisis dari rasio ekonomis untuk Kota Pangkalpinang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1
Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Periode
Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Anggaran	Anggaran Pengeluaran	Tingkat Ekonomis (%)
2015	808.541.648.446,64	994.788.838.491,51	81,27
2016	990.400.826.523,00	1.069.564.588.119,00	92,60
2017	816.819.790.496,16	967.579.128.360,13	84,41
2018	883.544.427.937,98	1.061.621.919.706,30	83,22
2019	954.727.423.814,72	1.071.296.711.328,05	89,11
	Rata-rata		86,122

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 berada pada tingkat rasio 81,27%. Pada tahun 2016 tingkat ekonomis Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang meningkat cukup pesat sebesar 11,33% menjadi 92,60%. Untuk tahun 2017 menurun sebesar 8,19% menjadi 84,41% dan kembali menurun pada tahun 2018 sebesar 1,19% menjadi 83,22%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 5,89% menjadi 89,11%. Secara keseluruhan rata-rata rasio ekonomis selama 2015-2019 sebesar 86,122%. Dari data di atas, dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang berdasarkan pengukuran rasio ekonomis berada pada range ekonomis. Dari data periode Lima tahun, tidak ada yang berada di atas 100%. Dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2016 yang menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Pangkal pinang masih dapat mengelola anggaran tahun 2016 tersebut secara ekonomis. Selain itu, jika dilihat dari periode tahun 2015-2018 rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang tidak terlalu mengalami fluktuasi peningkatan/penurunan yang signifikan. Akan tetapi, perlu

digarisbawahi bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang mampu melakukan penghematan terbesar yaitu sebesar Rp 186.761.421.617. Maka dapat disimpulkan bahwa selama rentang waktu 2015- 2019, kinerja keuangan pemerintah Kota Pangkal Pinang berdasarkan rasio ekonomis mengalami peningkatan kinerja kecuali pada tahun 2016.

2. Rasio Efisiensi

Rasio ini menjelaskan rasio perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi sebuah anggaran bisa dilihat dari berapa presentase tingkat pencapaian. Analisis dari rasio efisiensi untuk Kota Pangkalpinang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang periode
Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Anggaran	Anggaran Pengeluaran	Tingkat Ekonomis (%)
2015	797.819.738.788,28	808.541.648.446,64	101,34
2016	990.400.826.523,00	978.370.757.245,00	101,23
2017	868.463.985.179,84	816.819.790.496,16	94,05
2018	915.529.305.584,73	883.544.427.937,98	96,50
2019	916.390.339.757,25	954.727.423.814,72	104,18
Rata-rata			99,46

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan data Tabel 2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 dan 2016 mempunyai rasio efisiensi sebesar 101,34% dan 101,23% yang berarti Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang tidak efisien dalam mengelola dana karena berada pada nilai >100%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu sebesar 7,18% menjadi 94,05% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 2,45% menjadi 96,50%. Pada tahun 2017 dan 2018 ini berarti bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang dinyatakan berjalan secara efisien. Sedangkan pada tahun 2019 rasio efisiensi kembali meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 7,68% menjadi 104,18% dan berada pada nilai >100% yang artinya pada tahun tersebut belanja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang lebih besar dibandingkan pendapatannya. Namun secara keseluruhan kinerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang telah berjalan dengan efisien dengan keseluruhan rata-rata rasio efisiensi sebesar 99,46%, yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang mampu dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum menggunakan sumber daya yang diperlukan.

3. Rasio Efektivitas

Rasio ini menjelaskan rasio pengukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Tingkat efektivitas sebuah anggaran bisa dilihat dari berapa presentase tingkat pencapaian. Analisis dari rasio efektivitas untuk Kota Pangkalpinang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang
Periode Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Anggaran	Anggaran Pengeluaran	Tingkat Ekonomis (%)
2015	797.819.758.788,28	853.965.575.459,70	93,42
2016	978.370.757.245,00	977.564.588.119,00	100,08
2017	868.376.081.019,17	868.463.985.179,84	99,98
2018	915.529.305.584,73	912.450.530.891,00	100,33
2019	916.390.339.757,25	891.694.331.924,00	102,76
	Rata-rata		99,314

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 berada pada range tidak efektif dengan rasio 93,42%. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang meningkat sebesar 6,66% menjadi 100,08%. Tahun 2017 sedikit menurun sebesar 0,10% menjadi 99,98% dan kembali meningkat di tahun 2018 sebesar 0,35% menjadi 100,33%. Lalu kembali meningkat dengan pada tahun 2019 sebesar 2,43% menjadi 102,76%. Secara keseluruhan rata-rata rasio efektivitas selama 2015- 2019 sebesar 99,314%. Dari data di atas, dapat diketahui Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang berdasarkan pengukuran rasio efektivitas tidak berjalan secara efektif. Dari data periode lima tahun, ada tiga periode yang berada di atas 100%, yaitu pada tahun 2016, 2018, dan 2019.

Secara keseluruhan kinerja keuangan dilihat dari rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas masih dalam kategori dan mengalami fluktuasi, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah kota Pangkalpinang memiliki komitmen untuk tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Selanjutnya kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan perjanjian kinerja secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Namun tetap melakukan perbaikan apabila belum tercapai dari kinerja keuangan tersebut.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Pangkalpinang dari tahun 2015 sampai dengan 2019 kinerja keuangannya secara ekonomis tercapai karena dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selanjutnya tingkat efisiensi Pemerintah Kota Pangkalpinang belum efisien karena tahun 2015, 2016 serta tahun 2019 tidak tercapai hal ini dikarenakan pada tahun tersebut belum mampu dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum menggunakan sumber daya yang diperlukan. Rasio efisiensi tidak memenuhi target tahun 2015, 2016 dan 2019, namun apabila direrata dalam periode 5 tahun masih dalam kategori efisien. Untuk rasio efektifitas juga tidak tercapai pada tahun 2016, 2018 dan 2019, artinya pemerintah Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun tersebut belum tepat sasaran dalam mengelola ke efektifitas anggaran yang disediakan.

Daftar Pustaka

- Adams, C. A., Muir, S., & Hoque, Z. (2014). Measurement of sustainability performance in the public sector. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2012-0018>
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Bastian, I. (2019a). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. In *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Bastian, I. (2019b). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Erawan, P. A., Santosa, M. S. W. A., Budiarta, D. K. B., & Wahyudi, P. T. A. (2019). Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i3.20010>
- Halim, A., & Kusufi, S. (2017). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*.
- Hasthoro, H. A., & Sunardi, S. (2016). Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>
- Herdiansyah, H. (2010). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. In *Jakarta: Salemba Humanika*.
- Hidayat, T. W., & Riharjo, I. B. (2015). Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value for Money. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*.
- Inayati, N. I. (2018). Implementasi Pengukuran Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Kontemporer*.
- Karimi Muiruri, Z. (2015). The Influence of the Balanced Score Card on Performance of Public Sector Organizations in Kenya. *Science Journal of Business and Management*. <https://doi.org/10.11648/j.sjbm.20150305.13>
- Khikmah, A. (2014a). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal Akuntansi-Unesa*, 3(1).
- Khikmah, A. (2014b). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Konsep Value For Money. *Jurnal Akuntansi Akunesa Universitas Negeri Surabaya*.

- Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Penerbit ANDI.
- Melnyk, S. A., Bititci, U., Platts, K., Tobias, J., & Andersen, B. (2014). Is performance measurement and management fit for the future? *Management Accounting Research*.
<https://doi.org/10.1016/j.mar.2013.07.007>
- Moehariono. (2018). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. (Cetakan 2). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moh. Nazir. (2014). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.
- Nursam, N. (2017). Manajemen Kinerja. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*.
<https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.438>
- PPN/Bappenas. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*.
- Samsonowa, T. (2012). Performance Management. In *Contributions to Management Science*.
https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2762-0_2
- Sari, N. C. F. (2014). Prinsip Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*.
- Septariani, J. (2018). Penerapan Konsep Value For Money Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*.
<https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1169>
- Siemiatycki, M., & Farooqi, N. (2012). Value for money and risk in public-private partnerships. *Journal of the American Planning Association*.
<https://doi.org/10.1080/01944363.2012.715525>
- West, D., & Blackman, D. (2015). Performance Management in the Public Sector. *Australian Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12130>
- Zhonghua, C., & Ye, W. (2012). Research Frontiers in Public Sector Performance Measurement. *Physics Procedia*. <https://doi.org/10.1016/j.phpro.2012.03.159>